

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah salah satu tuntutan bagi sebuah negara berkembang dan pembangunan nasional akan terlaksana dengan baik apabila ada koordinasi dari segenap masyarakatnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia atau individu seutuhnya dan masyarakat seutuhnya. Pembangunan sektor pertanian di Indonesia, sejak orde baru hingga sekarang terus ditingkatkan pengelolaannya dengan berbagai cara dilakukan baik oleh pemerintah, pihak terkait dan masyarakat tani sendiri. Peran pemerintah dalam hal pembangunan pertanian ialah dengan memberikan program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya di daerah pedesaan (Jaya et al. 2017).

Pemberdayaan petani dikenal dengan program penyuluhan, dimulai bersamaan dengan berdirinya Departemen Pertanian (Karsidi, 2012). Ini menunjukkan bahwa usaha pemberdayaan pertanian di Indonesia sudah sejak dulu dilakukan. Namun hasil dari pemberdayaan tersebut belum maksimal, terbukti pertanian Indonesia masih kalah bersaing dengan produk pertanian luar negeri. Pemberdayaan petani secara mendasar berarti menempatkan masyarakat petani beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Kemajuan ekonomi sangat bergantung pada pemberdayaan petani yang mana menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan dan dikembangkan sehingga dapat terbentuknya jaringan tingkat kesejahteraan rakyat (Spring, 2008).

Keberdayaan petani merupakan kemampuan dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait diri petani termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial di masyarakat, keberdayaan tersebut dapat berupa keberdayaan dalam bentuk kemauan, kemampuan, kesanggupan, dan kesiapan petani untuk mandiri, baik dalam mengembangkan, memenuhi, maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usahatani. Keberdayaan petani dalam mengelola usahatani berkaitan erat dengan situasi lingkungan serta keadaan yang melekat pada dirinya (Putnam et al.1993).

Keberdayaan terhadap petani diidentifikasi dari: penurunan subsidi input, lemahnya kebijakan agraria dan proteksi pasar, penyediaan informasi dan inovasi, pengembangan sumberdaya manusia yang rendah dan kurangnya sarana prasarana pertanian (Wahono, 2011). Akibatnya petani sulit mengakses input produksi, informasi dan inovasi, pasar, modal dan sarana prasarana untuk mendukung usaha tani. Petani berperan menentukan berbagai alternatif yang harus dipilih untuk diusahakan, menentukan cara dalam pengadaan sarana produksi, menentukan cara dalam proses produksi, pemasaran dan peningkatan jumlah produksi dari usahatani agar dapat dijalankan secara berkelanjutan (Zakaria & Nurasa, 2013). Menurut Sadono (2012) keberdayaan petani dapat dilihat dari kemampuan petani dalam mengakses informasi, kemampuan dalam mengakses pasar, kemampuan bermitra dan kemampuan beradaptasi petani.

Tabel 1. Angka Kemiskinan di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

Tahun	Angka Kemiskinan (%)
2017	19,78%
2018	18,27%
2019	17,39%
2020	17,02%
2021	17,43%

Sumber : BPS Provinsi Aceh, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Aceh Utara memiliki potensi dalam bidang pertanian. Sektor pertanian di Kabupaten Aceh Utara memiliki keterkaitan erat dengan pengurangan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan usaha membangun ketahanan pangan. Namun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara masih terbilang tinggi. Berdasarkan data BPS mencatat Pada tahun 2017 angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara mencapai 19,78%, tahun 2018 kemiskinan di Aceh Utara mengalami penurunan yaitu 18,27%, tahun 2019 jumlah angka kemiskinan mencapai 17,39%, kemudian pada tahun 2020 persentase kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara juga semakin menurun mencapai 17,02% dan pada tahun 2021 angka kemiskinan kembali tinggi yaitu mencapai 17,43% lebih tinggi daripada angka kemiskinan pada tahun 2020. Ini berarti masyarakat Aceh Utara yang mayoritasnya petani masih belum mampu memenuhi tingkat kesejahteraannya untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Aceh Utara (BPS provinsi Aceh, 2022). Pemikiran tentang

ketidakberdayaan petani semakin diperkuat dengan posisi Kabupaten Aceh Utara yang menempati urutan termiskin nomor 10 di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 16,86% atau 107.020 jiwa (BPS, 2023).

Kecamatan Nisam merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Kecamatan Nisam terdapat dua puluh sembilan gampong dengan jumlah masyarakat miskinnya yang terbilang banyak dengan jumlah persentase 20,98% (BPS Aceh Utara, 2020). Sejak tahun 2016 Kecamatan Nisam dikatakan sebagai salah satu Kecamatan yang rawan pangan. Karena banyaknya keluarga prasejahtera yang berjumlah 2.924 jiwa di Kecamatan Nisam dengan posisi urutan kedua di Kabupaten Aceh Utara (BPS, 2016).

Berdasarkan hasil survey, sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) panel modul konsumsi dan kor, maka data terbaru yang ada, hanya sampai 2016 menunjukkan bahwa Kecamatan Nisam merupakan kecamatan dengan jumlah keluarga prasejahtera terbanyak nomor 2 di Aceh Utara. Sehingga pada tahun 2017 pemerintah memberikan bansos kepada keluarga dalam kategori prasejahtera. Tujuan dari Bansos adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan bencana. Tujuan Bansos dianggarkan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya jelas. Selain itu, Bansos juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan (BPS Aceh Utara, 2016).

Padi sawah merupakan komoditas unggulan yang diusahakan oleh petani di Kecamatan Nisam dengan jumlah produktivitas 7,2 Ton/Ha dengan luas lahan padi sawah 1.757 Ha (BPP Nisam Aceh Utara, 2022). Dalam meningkatkan jumlah produksi pertanian dan dalam menambah wawasan atau skill petani dalam kegiatan usahatani maka dibutuhkan sarana dan prasarana agar dapat meningkatkan keberdayaan petani. Masalah yang dihadapi petani di Nisam Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Petani Padi 25% belum menggunakan benih tanaman padi varietas unggul/bersertifikat
- 2) Petani Padi 60% belum melakukan pemupukan spesifik lokasi pada tanaman padi
- 3) Petani Padi 40% belum melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman padi secara terpadu.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa belum semua petani padi yang ada di kecamatan Nisam memiliki kemampuan yang handal dalam mengelola usahataniya terutama dalam hal pemupukan. Kondisi ini berkaitan erat dengan tingkat keberdayaan petani padi sawah di Kecamatan Nisam. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penelitian ini perlu dilakukan terkait analisis tingkat keberdayaan petani padi sawah di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu bagaimana analisis tingkat keberdayaan petani padi sawah di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat keberdayaan petani padi sawah di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terkait keberdayaan petani padi sawah di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, sebagai berikut:

1. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang analisis tingkat keberdayaan petani padi sawah di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi atau tambahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai keberdayaan petani padi sawah di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.